

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pendidikan luar sekolah memiliki ranah luas sehingga berdampak pada keragaman program-programnya yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan terkait pendidikan di luar sistem persekolahan. Penyuluhan dan pelatihan merupakan bagian dari program-program tersebut, yang penyelenggaraannya tidak hanya menyangkut pada peningkatan keterampilan tetapi juga berdampak pada kesejahteraan. Meskipun dalam pelaksanaannya memiliki kesamaan, namun penyuluhan dan pelatihan memiliki perbedaan. Pelatihan sengaja dilakukan untuk memberikan sarana bagi masyarakat yang membutuhkan peningkatan keterampilan tertentu, sehingga pelaksanaannya juga dapat dikenakan biaya. Sedangkan penyuluhan merupakan kegiatan yang sengaja dilakukan untuk meningkatkan keterampilan melalui peningkatan pengetahuan masyarakat atau kelompok yang benar-benar membutuhkan saja. Penyuluhan biasanya dilaksanakan oleh penyuluh sebagai penanggung jawab keberhasilan penyuluhan. Menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2006, penyuluh merupakan pendamping dan pembina. Dengan demikian, penyuluh merupakan widyaiswara dalam program penyuluhan yang memiliki tugas membimbing masyarakat untuk memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang berdampak pada kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, peran penyuluh ini tidak hanya mendidik, tetapi juga membantu pengentasan kemiskinan yang menjadi masalah pokok di Indonesia.

Kemiskinan merupakan penyakit sosial yang diderita mayoritas masyarakat Indonesia. Kondisi ini terjadi tidak hanya di pedesaan atau daerah-daerah pinggiran, melainkan juga di kota-kota besar. Pendapatan tidak merata merupakan indikator utama kesejangan ekonomi yang terjadi. Golongan berpendapatan tinggi akan semakin besar kekayaannya, sedangkan golongan ekonomi lemah tidak dapat memperoleh kehidupan yang layak, bahkan kesulitan menempuh pendidikan yang cukup untuk meningkatkan taraf hidupnya. Jika dibiarkan hal ini dapat menyebabkan adanya *intergeneration poverty* atau kemiskinan yang diwariskan.

BPS tahun 2015 (Kompasiana, 2017) mencatat bahwa angka kemiskinan tertinggi di Indonesia berada di Jawa Timur. Sekitar 4.775.000 penduduk Jawa Timur tergolong miskin. Menurut Badan Perencanaan Lusy Setiyowati, 2018

**PERAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) SEBAGAI INOVATOR, KOMUNIKATOR, ORGANISATOR, DAN PENGHUBUNG ANTAR SISTEM TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN PETANI DALAM MENGELOLA PERTANIAN** Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur (2017), jumlah penduduk miskin di Jawa Timur periode Maret hingga September 2016 telah mengalami penurunan sebesar 0,20 persen tapi masih tergolong tinggi. Pada bulan Maret 2016 penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 12,05 persen, sedangkan pada bulan September 2016 sebesar 11,85 persen atau 4.638,53 ribu jiwa. Kondisi tersebut terulang kembali pada tahun 2017. Tidak terjadi penurunan berarti jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. BPS pada tanggal 17 Agustus 2017 melaporkan bahwa hanya terjadi penurunan sebesar 0,08 persen jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Pada bulan Maret 2017 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur masih mencapai 11,77 persen. Menteri PPN/Kepala Beppenas Bambang Brodjonegoro saat mengisi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Detiknews, 2017) menyampaikan bahwa penduduk miskin di Jawa Timur didominasi oleh daerah pedesaan. Dengan demikian, hingga saat ini kesejahteraan penduduk di Jawa Timur masih belum merata, terutama di daerah pedesaan. Pasalnya, terdapat beberapa kota besar di Jawa Timur yang memiliki rata-rata ekonomi penduduk tinggi. Surabaya telah mengalami kemajuan pesat di bidang industri, Malang dan Batu maju dengan memanfaatkan pesona pariwisatanya, Jember dengan pengelolaan hiburan bagi wisatawan sehingga menjadi Kota Karnaval pada tahun 2017 lalu, serta Banyuwangi yang memiliki potensi wisata maupun hiburan yang diminati karena lokasinya yang dekat dengan Pulau Dewata Bali. Beberapa kota tersebut telah berhasil memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk berkembang dan memajukan ekonomi masyarakatnya. Ironisnya selain beberapa daerah tersebut, kemiskinan masih menjangkit daerah di Jawa Timur yang berlimpah sumber daya alam dan manusianya. Hal inilah yang disebut dengan pembangunan tidak merata.

Bojonegoro sebagai daerah penghasil migas terbesar di Jawa Timur menempati urutan ke sembilan dari 38 kota dan kabupaten di Jawa Timur yang tergolong miskin (Kompasiana, 2017). Seharusnya, hasil-hasil alam di Bojonegoro tersebut lebih dari cukup untuk menopang kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan yang baik. Kenyataannya, produksi migas di Bojonegoro kurang memiliki pengaruh positif terhadap kemajuan perekonomian masyarakat. Pasalnya sudah bukan rahasia lagi jika sebagian besar aset alam tersebut dikuasai asing. Upah masyarakat Bojonegoro masih tergolong rendah. Mereka hanya bekerja sebagai kuli dalam produksi migas di wilayahnya. Pekerjaan ini memiliki masa kontrak yang tidak dapat

**Lusy Setiyowati, 2018**

*PERAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) SEBAGAI INOVATOR, KOMUNIKATOR, ORGANISATOR, DAN PENGHUBUNG ANTAR SISTEM TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN PETANI DALAM MENGELOLA PERTANIAN* Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

diandalkan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada kurang mampu mengelola sumber daya alam. Kualitas yang ada belum sebanding dengan kuantitasnya. Sehingga selain pekerjaan tersebut, masyarakat Bojonegoro banyak yang bergantung pada sektor pertanian.

Kabupaten Bojonegoro terletak di sebelah utara Kabupaten Tuban. Bojonegoro didominasi oleh tanah berbukit yang dihuni oleh sekitar 1.388.830 jiwa dengan pendidikan SD hingga Perguruan Tinggi. Menurut Maharani (2011) tanah di Bojonegoro merupakan tanah Grumusol yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan juga terdiri dari jenis tanah Alluvial, tanah Litosol, dan tanah Medeteran. Dengan kondisi tersebut, tidak heran jika banyak penduduk Bojonegoro yang bekerja sebagai petani. Namun, telah diketahui dalam data pembangunan daerah provinsi Jawa Timur bahwa kesejahteraan petani pun rendah. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur (2017), Nilai Tukar Petani Jawa Timur pada bulan Maret 2016 mengalami penurunan dari 101,81 menjadi 101,66 pada bulan Februari 2017. Data tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan petani di wilayah Bojonegoro tergolong rendah. Tidak heran jika Bojonegoro tergolong miskin meski didukung dengan potensi alamnya.

Hasil observasi di daerah Bojonegoro yang terdapat banyak lahan pertanian yaitu Desa Banjarjo, diketahui bahwa serangan hama membuat hasil panen merosot. Banyak petani yang kesulitan mengatasi masalah hama hingga ada yang tidak membawa pulang sama sekali hasil panen. Banyak petani yang mengaku merugi besar karena hama yang menyerang. Mereka sudah mencoba beragam cara atas saran sesama petani namun tetap tidak dapat menyelamatkan padinya. Setelah gagal panen, petani di Desa Banjarjo banyak yang memilih untuk tidak bertani lagi, khususnya mereka yang masih harus menyewa sawah untuk bertani. Hal ini diketahui dari jumlah petani yang mengikuti lelangan sawah pada tahun 2016 sebanyak 41 orang menurun tajam menjadi 4 orang pada tahun 2017. Beberapa dari mereka yang gagal panen dan tidak memiliki lahan pertanian sendiri mengaku tidak memiliki biaya untuk membayar sewa lahan milik pemerintah desa setempat. Sehingga pada periode tanam selanjutnya, banyak petani yang takut untuk menanam padi lagi. Kondisi ini disebabkan karena ketidaksiapan petani menanggung risiko gagal panen yang bisa terjadi kembali. Beberapa petani juga diketahui sulit mencari alternative untuk mengatasi masalah gagal panen. Hasil penelitian Tamba dan Sarma (2007) **Lusy Setiyowati, 2018**

*PERAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) SEBAGAI INOVATOR, KOMUNIKATOR, ORGANISATOR, DAN PENGHUBUNG ANTAR SISTEM TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN PETANI DALAM MENGELOLA PERTANIAN* Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

melaporkan bahwa kebanyakan petani hanya saling mencari solusi antar sesama petani tanpa adanya dukungan pihak yang lebih berkompeten untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa petani belum memiliki kemandirian dalam menghadapi masalah-masalah dalam usaha taninya sendiri.

Kemandirian petani (*farmer autonomy*) adalah kemampuan petani dalam menyelesaikan permasalahan dan mengambil keputusan yang tepat untuk keberlanjutan usaha taninya dengan mempertimbangkan juga lingkungan sosial masyarakat (Sumardjo, 1999). Kemampuan tersebut dapat dimiliki petani apabila mereka mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bertani. Dengan demikian, petani membutuhkan peranan pihak yang dapat mendorongnya untuk mengubah perilaku ke arah lebih baik melalui informasi dan pendampingan khusus dalam mengelola pertaniannya secara mandiri (Yulida, dkk., 2012; Rahmaninta, 2016; Mardikanto, 2009). Pasalnya menurut Wiriadmadja penyuluhan pertanian merupakan program pendidikan luar sekolah yang bagi petani dan keluarganya agar memiliki pengetahuan untuk berswadaya dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam bertani dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahterannya (Sadono, 2008).

Penyuluh di Desa Banjarjo, Kabupaten Bojonegoro memutuskan melakukan upaya peningkatan kemandirian petani melalui program penyuluhan pertanian setelah terjadinya gagal panen didaerahnya. Penyuluhan tersebut diberikan kepada para petani sebelum masa tanam dan setelah padi berumur dua minggu. Seluruh peserta penyuluhan memperoleh perlakuan sama. Penyuluh menyampaikan materi secara lisan tanpa alat bantu *power point*, *video*, *white board* maupun *layout*. Materi disampaikan oleh dua orang penyuluh secara langsung melalui ceramah. Penyuluh memiliki latar belakang pendidikan di bidang penyuluhan pertanian dan cukup lugas dalam menyampaikan materi. Setiap penyampaian materi dikaitkan dengan masalah yang dihadapi petani secara langsung. Setelah kejadian gagal panen akibat hama misalnya, penyuluh memberikan materi tentang cara penanganan hama yang baik.

Hal yang dilakukan penyuluh terbukti mendorong petani untuk mengadopsi seluruh informasi baru yang diterima selama penyuluhan. Pemerintah desa mengaku bahwa upaya tersebut berhasil meningkatkan hasil panen petani di Desa Banjarjo, Kabupaten Bojonegoro. Petani mampu mengkondisikan sawahnya agar layak ditanami dan tidak lagi kesulitan

mengatasi masalah hama. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan perilaku petani ke arah lebih baik sebagai akibat peran penyuluh pertanian lapangan (PPL). Pasalnya, tidak ada dukungan media dan fasilitas yang memadai untuk belajar sehingga dari hasil observasi awal tersebut peran penyuluhlah yang menonjol didalamnya. Oleh karena itu, perlu diketahui peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) terhadap tingkat kemandirian petani di Desa Banjarjo Kabupaten Bojonegoro.

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Kemandirian petani merupakan kemampuan petani dalam mengelola pertaniannya untuk meningkatkan hasil panen dan memperkecil risiko gagal panen. Sebelum mengikuti penyuluhan, diketahui bahwa petani di Desa Banjarjo terkendala dalam mengatasi hama. Hal ini dikarenakan sebagian besar petani hanya memperoleh informasi tentang cara mengatasi hama dari sesama petani. Mayoritas petani mengaku hanya mencoba mengatasi hama dengan berbagai pestisida tanpa melihat cara penggunaan yang tepat. Hal ini menyebabkan hampir seluruh petani mengalami gagal panen. Setelah kejadian tersebut, petani di Desa Banjarjo banyak yang mengaku takut untuk menanam padi lagi. Hal tersebut mengindikasikan rendahnya kemandirian petani di Desa Banjarjo, Kabupaten Bojonegoro. Kondisi ini akhirnya mendesak penyuluh untuk melakukan penyuluhan terhadap para petani di Desa Banjarjo, Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa upaya tersebut berhasil menjadikan petani mampu mengkondisikan sawahnya agar layak ditanami dan tidak kesulitan mengatasi masalah hama yang berdampak pada meningkatnya hasil panen petani di Desa Banjarjo, Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut membuktikan bahwa upaya penyuluhan pertanian yang dilakukan telah berhasil meningkatkan kemandirian petani.

Penyuluhan ini seharusnya dilakukan dengan baik karena terbukti terjadi peningkatan kemandirian petani. Dalam pelaksanaannya, penyuluhan dilakukan dengan beberapa komponen penting, baik itu tenaga penyuluh, fasilitas, maupun metode. Namun, dari hasil observasi diketahui ternyata masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan penyuluhan, yaitu:

1. Tidak terdapat fasilitas yang mendukung pelaksanaan penyuluhan seperti *layout*, proyektor, *white board*, maupun alat tulis.

**Lusy Setiyowati, 2018**

**PERAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) SEBAGAI INOVATOR, KOMUNIKATOR, ORGANISATOR, DAN PENGHUBUNG ANTAR SISTEM TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN PETANI DALAM MENGELOLA PERTANIAN** Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Tempat diadakannya penyuluhan tidak kondusif untuk belajar, kerana berada di lahan kosong sekitar area persawahan.
3. Tidak tersedia media penyuluhan maupun modul untuk belajar.
4. Hanya penyuluh yang langsung memberikan informasi baru terhadap petani melalui ceramah. Penyuluh diketahui berusia lansia namun masih semangat dalam menyampaikan informasi baru dalam penyuluhan.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, dapat diketahui bahwa penyuluhlah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kemandirian petani di Desa Banjarjo. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait peran penyuluh pertanian lapangan sebagai inovator, komunikator, organisator, dan penghubung antar sistem terhadap tingkat kemandirian petani.

### **1.3 Rumusan Masalah Penelitian**

Hasil identifikasi masalah penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki beberapa permasalahan yang dapat diuraikan ke dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyuluh pertanian lapangan sebagai inovator terhadap tingkat kemandirian petani?
2. Bagaimana peran penyuluh pertanian lapangan sebagai komunikator terhadap tingkat kemandirian petani?
3. Bagaimana peran penyuluh pertanian lapangan sebagai organisator terhadap tingkat kemandirian petani?
4. Bagaimana peran penyuluh pertanian lapangan sebagai penghubung antar sistem terhadap tingkat kemandirian petani?
5. Bagaimana peran penyuluh pertanian lapangan sebagai inovator, komunikator, organisator, dan penghubung antar sistem secara bersama-sama terhadap tingkat kemandirian petani?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis peran penyuluh pertanian lapangan sebagai inovator terhadap tingkat kemandirian petani.

**Lusy Setiyowati, 2018**

*PERAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) SEBAGAI INOVATOR, KOMUNIKATOR, ORGANISATOR, DAN PENGHUBUNG ANTAR SISTEM TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN PETANI DALAM MENGELOLA PERTANIAN* Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Untuk menganalisis peran penyuluh pertanian lapangan sebagai komunikator terhadap tingkat kemandirian petani.
3. Untuk menganalisis peran penyuluh pertanian lapangan sebagai organisator terhadap tingkat kemandirian petani.
4. Untuk menganalisis peran penyuluh pertanian lapangan sebagai penghubung antar sistem terhadap tingkat kemandirian petani.
5. Untuk mengkaji peran penyuluh pertanian lapangan sebagai inovator, komunikator, organisator, dan penghubung antar sistem secara bersama-sama terhadap tingkat kemandirian petani.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dilakukan untuk berbagai kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penguatan terhadap teori mengenai pengaruh peran penyuluh pertanian lapangan sebagai inovator, komunikator, organisator, dan penghubung antar sistem terhadap kemandirian petani di Desa Banjarjo. Selain itu, hal tersebut juga dimaksudkan agar menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan contoh praktik penerapan salah satu program Pendidikan Luar Sekolah dalam memberdayakan petani melalui peran penyuluh pertanian yang baik hingga mencapai tujuan diadakannya penyuluhan sebagai kajian tentang solusi untuk meningkatkan kemandirian petani. Selain itu, hasil penelitian ini secara praktis juga diharapkan dapat memberikan analisis yang berguna bagi peningkatan upaya penyuluhan yang dilakukan.

### 1.6 Struktur Organisasi Tesis

BAB I : Pendahuluan, didalamnya membahas tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Serta Struktur Organisasi penulisan draft penelitian.

**Lusy Setiyowati, 2018**

*PERAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) SEBAGAI INOVATOR, KOMUNIKATOR, ORGANISATOR, DAN PENGHUBUNG ANTAR SISTEM TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN PETANI DALAM MENGELOLA PERTANIAN* Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- BAB II : Kerangka Teoritik, didalamnya membahas tentang kemandirian petani yang meningkat karena adanya peran penyuluh pertanian. Teori-teori tentang kemandirian petani dan peran penyuluh dijabarkan untuk mempermudah proses penelitian.
- BAB III : Metodologi Penelitian, didalamnya membahas tentang Jenis Penelitian, Metode Penelitian, Desain Penelitian, Alat Pengumpul Data, dan Teknik Analisis Data yang diperlukan untuk mengetahui peran penyuluh sebagai inovator, komunikator, organisator, dan penghubung antar sistem terhadap tingkat kemandirian petani.
- BAB IV : Hasil dan Pembahasan, didalamnya membahas tentang hasil analisis data yang telah diperoleh terkait penerapan penyuluhan, peran penyuluh (sebagai inovator, komunikator, organisator, dan penghubung antar sistem), serta pengaruh peran penyuluh (sebagai inovator, komunikator, organisator, dan penghubung antar sistem) terhadap tingkat kemandirian petani.
- BAB V : Kesimpulan, didalamnya membahas tentang simpulan hasil penelitian, implikasi hasil penelitian, serta saran atau rekomendasi hasil penelitian.

**Lusy Setiyowati, 2018**

***PERAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) SEBAGAI INOVATOR, KOMUNIKATOR, ORGANISATOR, DAN PENGHUBUNG ANTAR SISTEM TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN PETANI DALAM MENGELOLA PERTANIAN*** Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu